

**PENGARUH SISTEM AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP
AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Solok)**

SKRIPSI

Dajikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Disusun Oleh :

RANDI APRIDONI
NPM .171000462201043

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MAHAPUTERA MUHAMMAD YAMINSOLOK

2021

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Solok)**

RANDI APRI DONI
171000462201043

PEMBIMBING : 1. JUITA SUKRAINI, SE., M.Si
2. Dr. SISKI YULIA DEFITRI, SE., M.Si

ABSTRAK

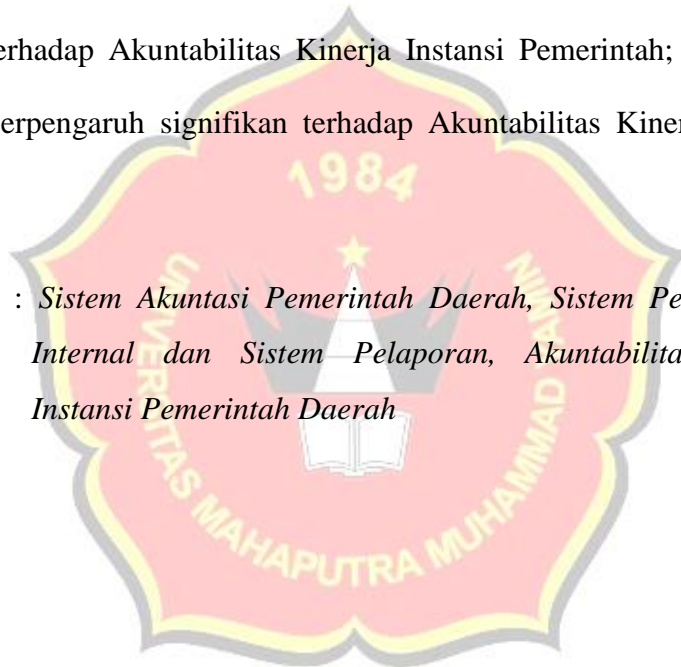
Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju sesuatu tatanan pemerintah yang demokratis penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel akan mendapatkan dukungan dari publik dipihak penyelenggara akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategis, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : (1) Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Populasi dalam penelitian ini adalah 26 Organisasi Pemerintah Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kata Kunci : *Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*



**THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT ACCOUNTING SYSTEM INTERNAL
CONTROL SYSTEM AND REPORTING SYSTEM ON ACCOUNTABILITY OF
LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONS PERFORMANCE
(Empirical Study on OPD Solok Regency)**

RANDIAPRIDONI
171000462201043

PEMBIMBING : 1. JUITA SUKRAINI, SE., M. Si
2. Dr. SISKI YULIA DEFITRI, SE., M. Si

ABSTRACT

Accountability is believed to be able to change the condition of a government that is unable to provide good and corrupt public services towards a democratic government structure, the implementation of an accountable government that will get support from the public on the part of the accountability organizer reflects the government's commitment to serving the public. The strengthening of public demands for the implementation of public accountability by government organizations, both central and local governments, has led to all government agencies compiling strategic planning, measuring performance and reporting it.

The purpose of this study was to determine: (1) the effect of the local government accounting system on the performance accountability of government agencies; (2) Influence of Internal Control System on Performance Accountability of Government Agencies; (3) Reporting System on Performance Accountability of Government Agencies.

This research was conducted at the Solok Regency Local Government Organization. The population in this study were 26 Local Government Organizations within the Solok Regency Government. The sampling

technique in this research is total sampling. This study uses Multiple Linear Regression Analysis.

The results of this study indicate that: (1) the Regional Government Accounting System has a significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies; (2) The Internal Control System has a significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies; (3) The Reporting System has a significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies.

Keywords: Local Government Accounting Systems, Internal Control Systems and Reporting Systems, Performance Accountability of Local Government Agencies



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang – Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang – Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sistem akuntansi yang baik karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable* dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dilingkungan pemerintah penyerahan kewenangan dari manajemen puncak kepada para manajemen level bawah yang dimaksudkan untuk mendekatkan tangan pemerintah kepada publiknya. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama pertanggungjawaban vertikal kepada pusat kedua, pertanggungjawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua

jenis pertanggungjawaban yang ada pada pemerintah daerah ini merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan adanya informasi dan pengungkapan tersebut baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberi informasi dan pengungkapan kinerja keuangan adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat yaitu hak untuk mendapatkan informasi hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya hak diberikan penjelasan dan hak menuntut tanggungjawab.

Dengan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good government*. *Good government* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dana investasi pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif dan menjalankan disiplin anggaran sehingga semangat reformasi pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan

mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menerapkan prinsip – prinsip *good government*(LAN dan BPKP, 2000 : 1). Terselenggaranya *good government* merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – citanya, ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju sesuatu tatanan pemerintah yang demokratis penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel akan mendapatkan dukungan dari publik dipihak penyelenggara akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah senantiasa tanggap terhadap lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas disamping pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pembagian tugas yang baik pada pemerintah yang ada dilingkungan daerah tersebut. Adanya kepercayaan masyarakat atas apa yang akan di

selenggarakan direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat dipihak para penyelenggara yaitu pemerintah akuntabilitas merupakan komitmen didalam melayani masyarakat.

Sedangkan instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menyampaikan pelaporan adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang di capainya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan petugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI. Dengan adanya otonomi daerah pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat berperan dalam pengukuran dan meningkatkan kinerja pemerintah selain itu penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga

berdampak pada penyusunan anggaran yang berdasarkan kinerja. Fenomena didalam penelitian ini yaitu Pemerintahan Kabupaten Solok telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Hasil dari evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP yang telah di lakukan oleh Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) pada pemerintahan Kabupaten Solok selama tiga tahun terakhir memperoleh predikat B.

Pada dasarnya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi dari akuntansi untuk dapat menjalankan proses akuntansi secara baik dan benar, apabila didalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah di lakukan secara benar dalam menyajikan laporan keuangan maka pertanggungjawaban atas laporan keuangan akan menjadi baik sesuai yang telah ditentukan secara tidak lansuang juga berpengaruh terhadap laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai mana penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Afrina, 2015; Aprianti, 2017; Fathia, 2017; Lumenta et al., 2016; Syahrir, 2019; Zulharman, 2015) dengan hasil bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh (Soleman et al., 2019) menyatakan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu untuk mencapai kinerja yang berakuntabilitas pemerintah menerapkan Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal pada pemerintahan pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Internal. Sistem pengendalian internal yang efektif dalam suatu pemerintahan yang akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik sehingga akan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya pengamanan asset Negara dan keandalan sebuah laporan keuangan daerah, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian yang di lakukan oleh (Afrina, 2015; Aprianti, 2017; Fitriyani & Herawati. Helmi, 2014; Kadek et al., 2014; Kahar et al., 2017; Soleman et al., 2019; Syahrir, 2019) bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain Sistem Pengendalian Internal ada juga yang membantu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Pelaporan. Sistem Pelaporan ini merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kinerja pusat pertanggungjawaban. Sistem Pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah di tetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh

pihak-pihak yang berkepentingan sehingga mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh (Afrina, 2015; Fathia, 2017; Fauzan, 2017; Fitriana et al., 2018; Riani, 2015) yang hasilnya sistem pelaporan tersebut berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Afrina, 2015) tentang pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Pekanbaru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afrina, 2015) terletak pada objek penelitian. Objek penelitian (Afrina, 2015) adalah OPD Kota Pekanbaru sedangkan penelitian menggunakan objek penelitian OPD Kabupaten Solok.

Bedasarkan hasil uraian diatas dalam latar belakang permasalahan dan hasil penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat di peroleh dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah Daerah.
4. Apakah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu semoga bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan diantaranya:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pemeritan Kabupaten Solok kedepannya.
3. Penelitian ini di harapkan bisa menjadi referensi dan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran khususnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut dibidang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahamannya, maka penelitian memformulasikan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB IPENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB IILANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori pendukung, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

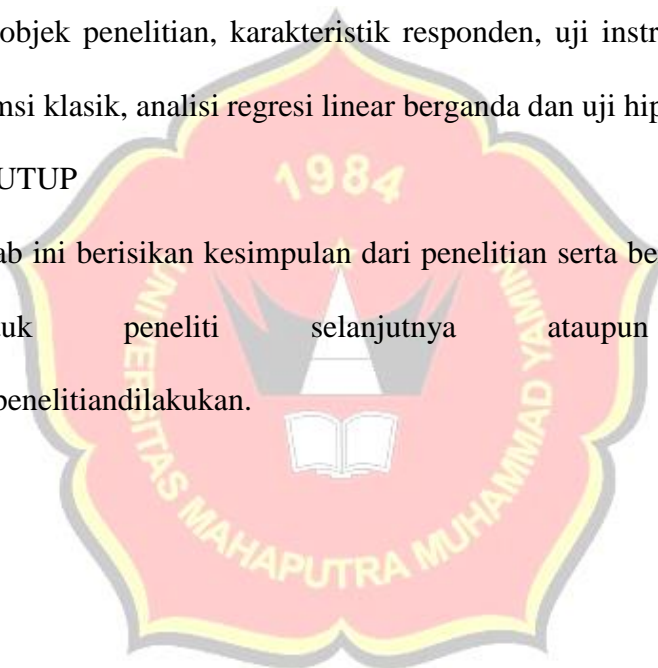
Pada bab ini berisi jenis penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, pengukuran variabel, teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini mengkaji tentang hasil penelitian dan pemhasanyang telah dilakukan. Dalam pembahasan ini melingkup tentang gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, uji instrument data, uji asumsi klasik, analisi regresi linear berganda dan uji hipotesis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta berisikansaran baik untuk peneliti selanjutnya ataupun untuk tempat peneliti dilakukan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Solok, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari peneliti sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Solok. Artinya, jika penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada nilai kinerja daerah yang dituangkan dalam nilai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok. Artinya, dengan adanya Sistem Pengendalian Internal didalam suatu pemerintahan, maka akan mempermudah pelaksanaan terhadap evaluasi dan tindak lanjut dari proses kegiatan yang ada khususnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Artinya, dengan adanya penyusunan sistem pelaporan yang baik akan dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kabupaten Solok. Hal itu disebabkan karena dengan adanya sistem pelaporan yang baik akan menciptakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik. Jadi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pelaporan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran.

4. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5.2 Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan Bagi pemerintahan Kabupaten Solok agar meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa memperluas ruang lingkup penelitian dan penambahan responden yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dan dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (*Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru*). *Jom FEKON Universitas Riau.*, Vol 2(No 2).
- Agustin, K. (2018). Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangang Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta). *Universitas Islam Indonesia*.
- Anjarwati. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, Vol 3(No 1), 1–7. <https://doi.org/10.15294/aaj.v1i2.555>
- Aprianti, R. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. (Survei pada 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat)* (hal. 1–17). *Jurnal Online Universitas Komputer Indonesia*.
- Arikunto, S. (2010). Metode Penelitian. In *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Suatu Pengantar Edisi Ketiga Jakarta: Erlangga.
- Fathia, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). (*Study Kasus SKPD di Provinsi Riau*), 4(1), 670–685.

- Fauzan, R. H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip). (*Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat*) Universitas Riau, Vol. 4(No. 1).
- Fitriana, R. D., Hidayati, N., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, Vol 7*(No 2).
- Fitriyani, N., & Herawati. Helmi. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (*Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah*), Vol 1(No 17), 19–35.
- Ghozali, I. (2011). “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*” Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, L. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Hall, J. (2011). *Accounting Information System*. Edisi Satu, Salemba Empat.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2016). *Akuntansi Pemerintah* (I. MEDIA (ed.)).

- Hidayatullah, A. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke. *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank*.
- IAPI. (2011). *Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)*. Edisi Mei 2009. Penerbit ikatan Akuntan public Indonesia, Jakarta.
- Kadek, N., Primayoni, R., Adiputra, I. M. P., & Sujana, E. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (*Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Klungkung*) *Jurnal Online Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2*(No 1).
- Kahar, A., Fitrawati, & Ikbal A, M. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (*Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Parigi Moutong*), *Vol 5*(No 12), 177–184.
- Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*. edisi ketiga. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Kumaat, V. G. (2011). *Internal Audit*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan berdemokrasi ke depan*. Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia) Jakarta.
- Lumenta, A. L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2016). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA, Vol 4*(No 2), 768–779.

- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Cetakan Keempat. Jakarta. Salemba Empat.
- Permadi, A. D. (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah daerah terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah*.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). *Pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. 1(1), 429–444.
- Priyatno, D. (2010). *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendarasan*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Putro, E. W. (2013). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*.
- Rasdianto, E. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*.
- Riani, I. (2015). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Online Universitas Riau*, 2(2).
- Setiawan, E. K. O. (2013). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*. *Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1–14.

Soleman, R., Soleman, R., & Zainuddin. (2019). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Online Universitas Khairun.*, Vol 3(No 1).

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung:Alfabeta (ed.)).

Syahrir, M. (2019). Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP). *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, Vol 4(No 2), 20–37.

Wiyono, G. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*. Yogyakarta: Percetakan STIM YKPM.

Zulharman, K. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (*Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru*) *Jom FEKON Universitas Riau*, Vol 2(No 2).

